

BAB II

PERGERAKAN POLITIK ETNIS KURDI DI TURKI

Pada bab ini akan dibahas mengenai perkembangan posisi etnis Kurdi di mata pemerintah Turki sejak berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 hingga pada masa pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (*Adalyet Kalkinma Partisi*; AKP) yang dimulai pada tahun 2002. Selain itu, bab ini akan membahas perihal pergerakan-pergerakan sosio-politik berbasis etnis Kurdi; mulai dari Partai Pekerja Kurdistan (*Partiya Karkeren Kurdistan*; PKK), hingga Partai Demokrasi Rakyat (*Halklarin Demokratik Partisi*; HDP) dan relasi antar keduanya untuk memberikan pemahaman akan signifikansi etnis Kurdi dalam jalannya perpolitikan Turki; yaitu kiprah HDP secara khusus di era Erdogan. Penurunan popularitas serta elektabilitas AKP dan Erdogan; lalu perspektif Erdogan terhadap eksistensi etnis Kurdi juga akan dibahas dalam bab ini untuk memberikan gambaran latar belakang tindakan dari sekuritisasi yang dilakukan Erdogan terhadap HDP.

2.1 Keberadaan Etnis Kurdi di Turki

Eksistensi etnis Kurdi selalu menjadi polemik tersendiri ditengah-tengah perkembangan Turki, mulai dari masa Imperium Usmani hingga berdirinya Republik Turki seperti sekarang ini. Bahkan dalam termin transisi gaya kepemimpinan sekularisme sampai dengan corak Islamisme Erdogan terdapat perubahan-perubahan perlakuan yang berbeda dalam menyikapi isu Kurdi. Pada bagian ini akan dibahas mengenai posisi etnis Kurdi dalam perpolitikan Turki; mulai dari berdirinya republik hingga di masa pemerintahan AKP sejak tahun 2002.

2.1.1 Asal-USul Etnis Kurdi

Asal mula etnis Kurdi merupakan orang Iran; berasal dari rumpun Indo-Eropa, namun terdapat beberapa teori tentang munculnya etnis ini. Pertama adalah teori *Northwest-Iranian Origin*, yang mengungkapkan bahwa etnis Kurdi merupakan turunan dari etnis yang menggunakan bahasa Iran Lama, seperti Medes, dengan deskripsi dari Georg Niebuhr (1776-1831); “setengah Aramaic dan setengah Median-Persian” (“*Kurden ein halb aramsches und halb medisch-persisches Volk*”).¹ Kedua, teori *Northeast-Iranian Origin* oleh Albert Socin (1844-1899) yang mengatakan bahwa asal-usul Kurdi merupakan migrasi dari Timur, yang akhirnya menjadi asal-usul orang Medes lalu bermigrasi ke Barat.² Ketiga, teori *Southwest-Iranian origin* yang berdasarkan pada kesamaan bahasa antara Persia, Balochi, dan Kurdi di wilayah Iran Tengah (wilayah yang eksis pada abad ke-empat hingga abad ke-sembilan masehi) dengan argumen sebagai berikut; orang-orang Persia, Balochi, dan Kurdi memiliki hubungan etnologi yang dekat, yang berasal dari daerah barat daya dari Iran modern, dan maka dari itu etnis Kurdi mestinya memiliki asal-usul linguistik dan etnis di daerah barat daya Iran.³

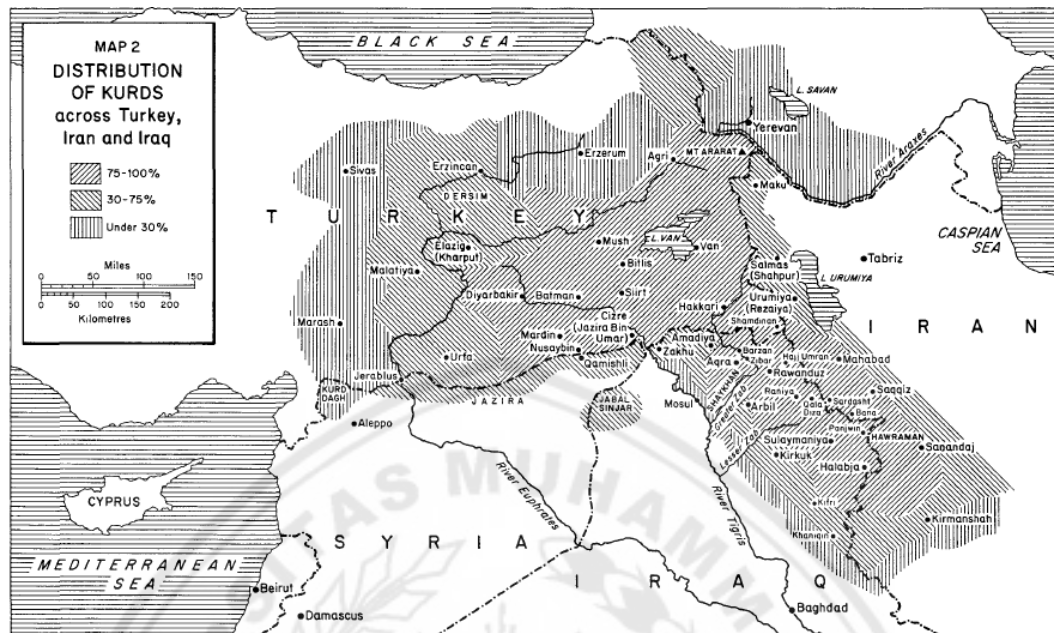
Hingga saat ini, etnis Kurdi tersebar di berbagai negara; seperti Turki, Iran, Iraq, hingga Suriah. Untuk memahami persebaran populasi Kurdi, dapat dilihat pada ilustrasi berikut:

¹ Teori ini akhirnya dipopulerkan oleh seorang Orientalis Rusia, Vladimir Federovich Minorsky (1877-1966); dikenal juga dengan teori *out-of-Medes*, dalam Ferdinand Hennerbichler, *The Origin of Kurds*, *Advances in Anthropology, SciRes*, Mei 2012, Vol. 2 No. 2, 64-79, hal. 64

² Mengutip Socin; “*Einwanderung vom Osten her “denkbar, von Medien aus einzlene iranische Stamme sich nach Westen hin verschoben*”, W. Geiger dan E. Kuhn (Eds.), *Grundriss der Iranischen Philologie*. Strassburg: Karl J. Trubner, dalam *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

Gambar 2.3.2 Peta Persebaran Populasi Etnis Kurdi



Sumber: David Mc. Dowall, A Modern History of The Kurds

Basis populasi Kurdi di Turki terletak di bagian selatan, tenggara serta tengah, meskipun lebih dominan di daerah tenggara. Sedangkan di Suriah, etnis Kurdi mendiami bagian utara yang dekat dengan perbatasan. Etnis Kurdi juga mendiami bagian utara Iraq dan barat laut Iran. Namun populasi etnis Kurdi yang paling besar terdapat di Turki. Etnis Kurdi pada dasarnya merupakan kelompok etnis yang memiliki pola hidup nomaden, dengan mata pencaharian utama mereka yaitu bertani dan beternak, dan populasinya tersebar diseluruh dataran Mesopotamia serta dataran tinggi di wilayah Turki dan Iran.⁴

Etnis Kurdi memainkan peran penting dalam perkembangan dinasti Sasanid, dan memberikan dukungan terhadap pasukan Muslim dalam periode tahun

⁴ Dataran Mesopotamia meliputi wilayah tenggara Turki, timur laut Syria, utara Irak, barat laut Iran, dan barat daya Armenia. *Who are the Kurds?*, BBC News, 14 Maret 2016, diakses melalui <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29702440> (5/3/2018, 12:06 WIB)

639-644 M. Hal ini berujung pada terjadinya asimilasi budaya serta agama dalam etnis Kurdi pada masa itu. Peran etnis Kurdi dalam memposisikan dirinya sebagai elemen pendukung maupun pemberontak terhadap penguasa pada saat itu silih berganti, dimulai dari zaman dinasti Umayyah, Abbasiyah, lalu dinasti Shaddadis (931-1075), sampai pada berdirinya imperium Usmani.⁵ Seiring berjalannya waktu, kesadaran identitas akan wilayah Kurdistan juga muncul. Maria T. O'Shea menggambarkan bahwa;

*“Kurdistan’s location, straddling the Anatolian/Zagros mountain chains, contributed to the heterogeneity of its ethnolinguistic makeup. Groups wishing to avoid interference from central government, such as tribally organized people, who consider their own form of government to be adequate, or heretical or unpopular sects, have often been drawn to inhospitable yet habitable regions. In these deserts and mountain areas, they are free to act out their lives without undue interference either from the state or more orthodox citizens.”*⁶

Berdasarkan kutipan diatas, dapat dilihat bahwa kelompok Kurdi sejatinya ingin bersatu secara mandiri atas dasar latar belakang etnis dan tidak ingin ada campur tangan dari pemerintah/rezim yang berkuasa. Kontur dataran di wilayah Kurdistan juga menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi etnis Kurdi. Pada kenyataannya tidak semua etnis Kurdi menetap di wilayah Kurdistan; tak sedikit penduduk yang hijrah ke wilayah Iran, maupun Turki.

⁵ David McDowall, 2004, *A Modern History of The Kurds, Revised Edition*. London: I.B Tauris, hal. 21-25

⁶ Maria T. O'Shea, 2004, *Trapped Between The Map and Reality: Geography and Perception of Kurdistan*, New York: Routledge, hal. 24

Keberadaan etnis Kurdi di wilayah Turki dimulai dengan pemberian hibah tanah oleh imperium Usmani pada abad ke 15 yang terletak di daerah Diyarbakir. Pada saat itu, terjadi peperangan antara Usmani dan dinasti Safawiyah, yang dikenal dengan perang Chaldiran. Terkait perang tersebut, pemerintah Usmani membuat perjanjian “*Qasr-e Shirin*” dengan etnis Kurdi; di mana jika etnis Kurdi mau ikut berperang dan membantu Usmani mengalahkan Safawiyah, maka sebagian wilayah pemerintahan Usmani akan diberikan kepada etnis Kurdi.⁷ Kemenangan pun diraih oleh pihak Usmani, dan sebagai imbalan-nya, etnis Kurdi diperkenankan untuk menjabat di lembaga pemerintahan yang berada di pusat kota dan daerah lainnya. Gubernur di daerah Diyarbakir, Anatolia, Erzerum, dan Van dijabat oleh orang dari etnis Kurdi. Otonomi daerah pun diberikan kepada etnis Kurdi.⁸

Perlahan-lahan, etnis Kurdi mulai membaaur dengan masyarakat Turki, meskipun etnis Kurdi bukan bagian dari Turki.⁹ Etnis Kurdi mulai menyebar ke wilayah utara seperti Istanbul dan Ankara, yang mayoritasnya berprofesi sebagai buruh tenun dan besi. Selain itu, etnis Kurdi juga tersebar di wilayah Diyarbakir, Van, Anatolia, dan lain-lain, dengan mata pencaharian utamanya yaitu berkebun dan beternak. Mayoritas populasi Kurdi terletak di Diyarbakir dan Anatolia. Bahasa yang digunakan oleh etnis Kurdi adalah bahasa *Kurmanji*, yang memiliki dialek *Zaza*.¹⁰ Dari segi agama, etnis Kurdi sebagian besar menganut Islam Sunni, namun

⁷ Ela Hikmah Hayati, 2015, *Kebijakan Pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk Terhadap Suku Kurdi di Turki Tahun 1923-1938 M*, Skripsi, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29439/1/ELA%20HIKMAH%20HAYATI%20-%20110022000017.pdf> (5/4/2018, 14:06 WIB) hal. 17

⁸ *Ibid.*, hal. 19

⁹ *Ibid.*, hal. 20

¹⁰ *Ibid.*, hal 20-21

etnis Kurdi memiliki tarekat-tarekat tersendiri.¹¹ Salah satu yang dianut adalah tarekat Naqshabandiyah.¹²

Hingga memasuki abad ke 20, di masa kekuasaan Sultan Abdul Hamid, etnis Kurdi menderita akibat perubahan sistem pemerintahan yang drastis dalam tubuh pemerintahannya. Muncul gerakan nasionalis Kurdi yang digagas oleh Sayyid Nihri, untuk memisahkan diri dari kekuasaan Usmani. Pada tahun 1908, juga dibentuk perhimpunan intelektual Kurdi, dengan nama Perhimpunan Bagi Dukungan dan Kemajuan Rakyat Kurdi (*Kurt Teavun ve Terakki Cemiyeti*) yang didirikan oleh Amin Ali Khan, Syaikh Abd al-Qadr dan Muhammad Sharif Pasha, dengan tujuan-tujuan sosial. Hingga pada tahun 1910, Syaikh Abd al-Qadr mengumumkan kepada masyarakat bahwa etnis Kurdi menginginkan pemerintahan daerah secara terpisah, melalui kelompok baru yang bernama Harapan Masyarakat Kurdi (*Hiviya Kurdi Jamiyati*).¹³ Keinginan akan kemerdekaan dan otonomi etnis Kurdi ini berlanjut hingga di masa kepemimpinan Mustafa Kemal, dalam naungan Republik Turki.

2.1.2 Posisi Etnis Kurdi Pasca Berdirinya Republik Turki

Melalui perjanjian *Sykes-Picot*, wilayah-wilayah kekuasaan Usmani diambil alih oleh negara-negara Sekutu, yang berdampak juga kepada keberadaan etnis Kurdi di Kurdistan. Akibat perjanjian ini, wilayah Kurdistan terbagi kedalam

¹¹ Tarekat merupakan ilmu tasawuf, cara atau aturan hidup (dalam keagamaan atau ilmu kebatinan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan (Luring).

¹² Tarekat Naqshabandiyah, atau juga dikenal dengan *Thariqah Qadiriyyah Naqshabandiyah* adalah perpaduan dari dua tarekat, yaitu Tarekat Qadiriyyah dan Naqshabandiyah. Kedua tarekat tersebut memiliki inti ajaran yang saling melengkapi, dan menekankan pentingnya syari'at dan menentang faham *Wihdatul Wujud*. Penggabungan kedua tarekat ini bertujuan untuk mencapai derajat kesufian yang lebih tinggi dengan lebih efisien, diakses melalui *Tareqat Naqshabandiyah*, <http://www.suryalaya.org/tqn1.html> (5/3/2018, 14:49 WIB)

¹³ Hayati, *Loc. Cit.*, hal. 35

beberapa wilayah negara. Namun, upaya etnis Kurdi untuk memperoleh kemerdekaannya tidak surut. Setelah para pemimpin Kurdi mencoba bernegosiasi dengan Mustafa Kemal Atatürk terkait keinginan otonominya, Kemal mengajukan proposal yang berisi tentang kebijakan perlindungan rakyat Turki dan Kurdi, dan permintaan pengajuan dirinya menjadi ketua TBBM yang baru. Gerakan Usmani Muda dan Turki Muda menyepakati proposal ini, namun tidak dengan etnis Kurdi yang merasa tidak puas karena otonomi yang dijanjikan tidak sepenuhnya lepas dari campur tangan pemerintah pusat. Etnis Kurdi kembali membujuk pihak Sekutu, tanpa sepengetahuan Kemal. Woodrow Wilson, selaku presiden Amerika Serikat pada saat itu mendukung keinginan etnis Kurdi pada tahun 1917. Perundingan antara pihak Sekutu, Kurdi dan Turki-pun akhirnya dilakukan melalui perjanjian *Sevres*, yang menyatakan kemerdekaan wilayah Kurdistan. Namun, disepakatinya kebijakan ini menimbulkan perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Kemal terhadap Sultan Muhammad IV, karena dirasa perjanjian ini merupakan kesepakatan sepihak.¹⁴

Setelah Kemal menjabat sebagai ketua Majelis Nasional Agung, dan memproklamkan kemerdekaan Republik Turki pada 1923, posisi etnis Kurdi semakin tidak diuntungkan. Pasca penandatanganan perjanjian *Lausanne*,¹⁵ Kemal mulai melakukan perubahan dalam sistem berdasarkan pada ideologi Kemalis yang

¹⁴ *Ibid.*, hal. 41

¹⁵ Perjanjian antara Turki dan Sekutu yang ditandatangani pada tanggal 24 Juli 1923 di Lausanne, dengan hasil perjanjian berupa klausul teritorial, pembatasan kedaulatan Turki, pengurangan peran Turki di selat Bosphorus, serta adanya pertukaran penduduk Turki dengan Yunani, dalam Wahyu Nirwanto, *Perjanjian Lausanne 1923: Pengakuan Kedaulatan Republik Turki Pasca Perang Kemerdekaan*, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, diakses melalui <https://dglib.uns.ac.id/dokumen/download/14797/Mjk2NjY=/Perjanjian-lausanne-1923-pengakuan-kedaulatan-republik-Turki-pasca-perang-kemerdekaan-abstrak.pdf> (5/3/2018, 16:26 WIB)

berfokus dalam membangun perekonomian dan memodernisasikan budaya Turki dengan ide-ide Barat. Kebijakan-kebijakan baru pun dikeluarkan, seperti; 1) penghapusan Kesultanan dan Kekhalifahan Turki Usmani, lalu 2) perubahan sistem sekuler, yang merupakan pemisahan antara agama dan negara, penghilangan nilai-nilai Islam yang ada di Turki. Dengan alasan bahwa agama merupakan elemen penghambat kemajuan negara. Bagi etnis Kurdi, ini merupakan hal yang berat karena terdapat larangan untuk menggunakan simbol-simbol keagamaan, serta sekularisasi dalam konteks pelarangan penerapan syari'at, hukum agama di ranah umum.¹⁶ Selain itu, Kemal juga mengeluarkan kebijakan Turkifikasi; di mana salah satu program-nya berupa pemberian kewarganegaraan Turki kepada seluruh elemen masyarakat yang berada di wilayah Turki. Kebijakan ini berpengaruh besar pada etnis Kurdi di Turki pada waktu itu, di mana Kurdi akhirnya diakui pemerintah dan mendapat status kewarganegaraan, namun disatu sisi impian otonomi Kurdi semakin terhambat.¹⁷ Kebijakan mengenai pembatasan ruang gerak suku Kurdi juga diterapkan, dengan memaksa rakyat Kurdi untuk menjadi buruh, dan menjadikan wanita Kurdi sebagai selir, dan juga anak-anak Kurdi yang tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan.¹⁸

Terkait persitiwa diatas, etnis Kurdi melakukan beberapa perlawanan, dimulai pada Februari 1925 yang dipimpin oleh Syekh Said (*Seyh Sait*)¹⁹, namun

¹⁶ Hayati, *Loc. Cit.*, hal. 44

¹⁷ *Ibid.*, hal. 49

¹⁸ *Ibid.*, hal. 51

¹⁹ Syekh Said (*Seyh Sait*) merupakan penggagas gerakan *uprising* Kurdi yang paling signifikan di masa awal Republik Turki. Said merupakan seorang Syekh yang menganut tarekat Naqshabandiyah dan memprovokasi masyarakat Kurdi dengan slogan "*the religion was being lost*", dalam Idris U. Eyryce, *Roots And Causes That Created The PKK Terrorist Organization*, Tesis, Naval Postgraduate School, September 2003, diakses melalui <http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a589796.pdf> (5/3/2018, 16:42 WIB) hal. 19

digagalkan angkatan bersenjata pemerintah. Setelah itu, ada pemberontakan Kurdi di lereng Gunung Arafat pada tahun 1926.²⁰ Dilanjutkan dengan pemberontakan pada tahun 1929 yang ternyata gagal.²¹ Terkait potensi untuk memberontak, pimpinan pergerakan Kurdi diasingkan ke daerah-daerah terpencil dan dijaga ketat oleh pemerintah.²² Selain itu, sebagian besar orang-orang Kurdi, yang berjumlah sekitar 20,000 orang dideportasi dari wilayah tenggara dan ditempatkan di wilayah barat Turki. Eksistensi Kurdi ditolak secara resmi, penggunaan bahasa Kurdi di depan publik dilarang oleh pemerintah (sebagai salah satu wujud Turkifikasi).²³ Etnis Kurdi yang mendapat tekanan dari rezim Kemal secara terus menerus juga memicu sikap perlawanan serta pemberontakan etnis Kurdi, hingga periode kudeta militer pertama di Turki di dekade 1960-an. Dalam kondisi negara yang tidak stabil ini, etnis Kurdi mulai bergerak kembali dalam memperjuangkan hak-hak asasinya dalam ranah politik. Seperti dibentuknya Partai Demokratik Kurdistan Turki (*Pariya Demokratik Kurdistan Turkiye; PDKT*) pada tahun 1965, namun tidak bertahan lama akibat keadaan sosio-politik yang kacau dalam kepemimpinan junta militer pada saat itu, serta perpecahan dalam inti partainya; antara pendukung ideologi perjuangan nasional dan perjuangan kaum buruh.²⁴ Pada periode ini juga PKK akhirnya dibentuk, dilanjutkan pada dekade 1980-an para aktivis dan

²⁰ Andina Sari Handayani, *Upaya Pemerintah Turki Dalam Mengatasi Gerakan Separatisme Suku Kurdi Tahun 1984-2007*, Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP UNS, Surakarta, diakses melalui <http://eprints.uns.ac.id/11152/1/611-1546-2-PB.pdf> (5/3/2018, 17:07 WIB) hal. 8

²¹ *Ibid.*, hal. 7

²² Eyryce, *Loc.Cit.*,

²³ *Ibid.*, hal. 9

²⁴ Paul White, 2015, *The PKK: Coming Down From The Mountains*, London: Zed Books, hal. 1

intelektual Kurdi yang non-radikal mulai menghimpun pergerakan melalui jalur kontestasi politik.

2.2 Pergerakan *Partiya Karkeren Kurdistan*

Kudeta militer Turki pada tahun 1960 memicu perubahan besar dalam hampir segala aspek masyarakat Turki. Kekuasaan junta militer, serta polarisasi antara kelompok sosialis Turki dan Kurdi. Masyarakat Kurdi pada masa itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Kurdi radikal, yang mendukung perjuangan berbasis militer; dan Kurdi yang memilih menggunakan jalur-jalur demokratis.²⁵ Pada rentang waktu antara dekade 1960-an dan 1980-an, Turki memasuki keadaan yang tidak stabil, di mana Konstitusi baru yang berlaku memperkenankan kelompok politik untuk menunjukkan persaingan, atau permusuhan (*rival ideas*). Kebebasan total ini memicu tumbuhnya beberapa kelompok politik dari masyarakat marginal. Masyarakat Turki terbagi kedalam dua kubu, sayap kiri dan sayap kanan. Hingga pada kudeta tahun 1971, pergerakan kelompok politik ini beralih menjadi gerakan bawah tanah (*underground*).²⁶ Salah satu yang muncul di periode ini adalah Partai Pekerja Kurdistan (*Partiya Karkeren Kurdistan*, PKK).

PKK terbentuk secara rahasia pada tanggal 27 November 1978 dalam pelaksanaan kongres pertamanya di desa Fis, provinsi Diyarbakir. Dipimpin oleh Abdullah Ocalan yang merupakan seorang revolusionaris Kurdi. Tujuan dari partai ini adalah untuk mendirikan negara Kurdi setelah berhasil melakukan revolusi komunis, namun PKK tidak memiliki kemampuan untuk melakukan revolusi

²⁵ Eyryce, *Loc. Cit.*, hal. 20

²⁶ Konfrontasi ideologis antara *self-styled revolutionaries* (revolusionaris) dan *self-styled nationalist* (nasionalis). Konfrontasi ini berujung pada jatuhnya korban jiwa, di mana ribuan orang dari kalangan mahasiswa dan politik dibunuh dalam kurun waktu mulai 1977 -1980, *Ibid*, hal. 23

karena keterbatasan persenjataan dan anggota, meskipun ide akan pembentukan PKK dan persiapannya telah digagas sejak 1974.²⁷ Dalam pendanaan organisasinya, anggota PKK mulai merampok toko-toko perhiasan dan terlibat dalam perdagangan narkoba.²⁸ Pasca kudeta September 1980, PKK muncul ke permukaan, dan memberikan pernyataan terkait kelompok-kelompok rivalnya; sebagai “*reformist, small bourgeois nationalists, and agent-provocateurs that coopeated with the goverment*”; atau “reformis, nasionalis borjuis cilik, agen provokator yang bekerjasama dengan pemerintah”. Akibat kudeta ini, rival-rival partai PKK pun hilang, dan menurut Eyryce; menjadikan PKK sebagai “*the most brutal terrorist organization in the history of Turkey*”, atau menjadi organisasi teroris yang paling brutal dalam sejarah Turki.²⁹ Terkait dengan kegagalan politik dan krisis ekonomi, membuat pemerintah sulit untuk mendirikan basis kekuasaan yang kuat. PKK yang muncul di awal dekade 1980-an mengejutkan para petinggi-petinggi militer, karena mereka percaya bahwa setelah penangkapan dan eksekusi massal kelompok teroris sayap kanan maupun sayap kiri di akhir dekade 1970-an cukup untuk meredam gerakan teroris; setidaknya dalam hitungan belasan tahun.³⁰ Pasukan gerilya PKK mulai dibentuk pada 1984, yang bernama Pasukan Pembebasan Kurdistan (*Hezen Rizgariye Kurdistan; HRK*) yang mulai beroperasi sejak tanggal 15 Agustus 1984 di daerah Eruh dan Semzinan.³¹ Kamp pelatihan untuk pasukan tersebut didirikan pada tahun 1982 di Lembah Beka’a, Libanon dengan bantuan dari Front

²⁷ White, *Op. Cit.*, hal.2

²⁸ Eyryce, *Loc. Cit.*, hal. 24

²⁹ *Ibid*, hal. 21

³⁰ *Ibid*, hal. 26

³¹ Pada tahun 2000 berganti nama menjadi Pasukan Pelindung Rakyat (*Hezen Parastina Gel; HPG*), dalam White, *Op. Cit.*

Demokratik Populer Pembebasan Palestina (*Popular Democratic Front for the Liberation of Palestine*; PDFLP). Hingga tahun 1995, jumlah personil pasukan HRK berjumlah sekitar tiga puluh ribu, dan sudah beroperasi di beberapa daerah Turki seperti Munzur, Gabar, Tendurek, Cudi, Agri, dan Dersim.³²

PKK menganut ideologi Marxisme-Leninisme dan Nasionalisme Kurdi, dengan tujuan utama mendirikan negara Kurdi di wilayah Turki bagian Tenggara. Struktur partainya terdiri dari *Serok*; atau pemimpin partai, Komite Sentral, dan Kongres yang menjadi otoritas formal tertinggi dalam organisasi tersebut.³³ Sejak kemunculannya, PKK gencar melakukan serangan militer terhadap objek pemerintah Turki. Selain itu, PKK juga melakukan teror terhadap desa-desa dan membantai warga sipil. PKK berambisi untuk menghapuskan partai politik, institusi pendidikan, badan representatif dan legislatif, serta semua kerjasama daerah dan badan-badan yang berkerjasama dengan pemerintah pusat wilayah Kurdistan. Keberadaan PKK membuat tuntutan etnis Kurdi akan kemerdekaan semakin menguat, yang berujung pada makin kuatnya tindakan represif pemerintah Turki terhadap etnis Kurdi. Pada tahun 1989, PKK memperkuat posisinya dengan melakukan koalisi dengan gerakan gerilya sayap kiri seperti Dev Sol,³⁴ TIKKO,³⁵

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*,

³⁴ Partai Pembebasan Revolusioner (*Devrimci Halk Kurtulus Partisi-chepesi*), berdiri pada tahun 1978 sebagai pecahan dari Partai Pembebasan Turki. Menganut ideologi Marxisme, dalam *Military, Global Security*, diakses melalui https://www.globalsecurity.org/military/world/para/dev_sol.htm (5/3/2018, 22:46 WIB)

³⁵ TIKKO; TKP/ML, *Maoist Komunist Partisi*, aktif sejak tahun 1972, menganut ideologi Komunisme dan Marxisme, dalam *Turkish Communist Party – Marxist-Leninist*, TRAC, diakses melalui <https://www.trackingterrorism.org/group/turkish-communist-party-marxist-leninist-tpml-tikko> (5/3/2018, 22:50)

dan THKP-C.³⁶ Selain itu PKK juga berkoalisi dengan partai-partai Kurdi lainnya di Irak; *Partiya Caseriya Demokratik a Kurdistan* (PCDK) Iran; *Partiya Jiyana Azad a Kurdistan* (PJAK), dan Suriah.; *Partiya Yekiti a Demokratik* (PYD).³⁷

PKK juga mendapat dukungan dari kelompok etnis Kurdi dari negara lain. Tak jarang masyarakat sipil terlibat dalam aksi gerilya PKK tersebut. Hingga tahun 1991 diperkirakan terdapat sekitar 3,568 korban jiwa yang berjatuh akibat konflik antara PKK dan angkatan bersenjata Turki.³⁸ Selain itu, dalam rentang waktu 1996-1999, anggota PKK gencar melakukan aksi bom bunuh diri (*suicide bombing*) serta pemboman di infrastruktur vital negara, hingga Ocalan tertangkap pada tahun 1999 dan divonis penjara seumur hidup.³⁹ Meskipun tertangkap; Ocalan tetap memimpin partainya dalam tahanan; karena Ocalan telah menunjuk dirinya sendiri sebagai pemimpin “yang tidak diragukan lagi” atau “*undisputed leader*” dari partai tersebut.⁴⁰ Penangkapan tersebut memicu gencatan senjata antara PKK dan pemerintah Turki, hingga akhirnya berakhir pada tahun 2004 atas permintaan PKK karena Angkatan Bersenjata Turki (*Türk Sillâh Kuvvetleri*; TSK) masih melakukan serangan-serangan terhadap PKK. Kondisi ini berlanjut hingga pada tahun 2013.⁴¹ Berikut ini adalah tabel kronologi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perkembangan PKK hingga di era pemerintahan Erdogan;

³⁶ THKP-C; *Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi*, partai berideologi Komunis dan Marxisme, dalam Handayani, *Loc. Cit.*, hal. 10

³⁷ White, *Op. Cit.*, hal. 2

³⁸ Handayani, *Loc. Cit.*, hal. 11

³⁹ Eyryce, *Loc. Cit.*,

⁴⁰ *Ibid*, hal. 26

⁴¹ White, *Op. Cit.*, hal. 4

Tabel 2.2.1 Kronologi Peristiwa-Peristiwa Penting Dalam Perkembangan *Partiya Karkeren Kurdistan*

No.	Tahun	Peristiwa
1.	1974	Penggagasan rancangan PKK, dipimpin oleh Abdulah Ocalan
2.	1978	PKK berhasil dibentuk dalam perhelatan Kongres Pertama
3.	1982	Perhelatan Kongres Kedua dan pembentukan pasukan HRK
4.	1984	Serangan pertama PKK di kantor polisi Jandarma
5.	1986	Perhelatan Kongres Ketiga dan penggantian HRK dengan ARGK (<i>Artesa Rizgariya Gele Kurdistan</i>)
6.	1990	Perhelatan Kongres Keempat
7.	1993	Ocalan mengajukan permintaan gencatan senjata secara unilateral dengan TSK, namun gagal dan PKK akhirnya membunuh tiga puluh tiga personil TSK
8.	1995	Perhelatan Kongres Kelima dan Kongres Pertama untuk PKK Wanita dan permintaan gencatan senjata secara unilateral dengan TSK
9.	1996	Berakhirnya periode gencatan senjata sejak tahun 1995
10.	1998	Perhelatan Kongres Keenam dan pembentukan Kongres Nasional Kurdi (<i>Kongrya Netewiya Kurdistan</i> ; KCK), serta permintaan gencatan senjata secara unilateral dengan TSK
11.	1999	Abdullah Ocalan ditangkap di Kenya
12.	2000	Perhelatan Kongres Ketujuh; pergerseran orientasi kebijakan dari aksi kekerasan menuju “transformasi demokratis”, dan penggantian nama dari ARGK menjadi <i>Hezen Parastina Gel</i> (HPG)

13.	2002	Perhelatan Kongres Kedelapan; digantikannya penggunaan nama PKK menjadi <i>Kongreya Azadi u Demokrasiya</i> (KADEK)
14.	2003	Penggantian nama KADEK menjadi <i>Kongra-Gel</i> (KGK)
15.	2004	Berakhirnya periode gencatan senjata sejak tahun 1998
16.	2005	Perhelatan Kongres Kesembilan, dan pengembalian nama menjadi PKK
17.	2006	Perseteruan bersenjata antara PKK dan TSK, hingga permintaan gencatan senjata secara unilateral oleh pihak PKK di bulan Oktober
18.	2007	Dialog antara PKK dan pemerintah Turki; permintaan gencatan senjata secara unilateral dengan TSK di bulan April namun TSK melakukan penyerangan terhadap basis PKK di Iraq pada bulan Oktober
19.	2008	Perhelatan Kongres Kesepuluh
20.	2009	Pemberlakuan kebijakan <i>Kurdish Opening</i> dan dibubarkannya partai <i>Demokrat Partisi</i> (DTP) oleh pemerintah Turki
21.	2010	Permintaan gencatan senjata secara unilateral dengan TSK
22.	2011	Berakhirnya periode gencatan senjata sejak tahun 2010
23.	2012	Dialog perdamaian antara Ocalan dengan Badan Intelijen Turki (<i>Mili Istihbarat Teskilati</i> ; MIT)
24.	2013	Ocalan menyatakan konflik antara pemerintah Turki dan PKK telah berakhir
25.	2015	Berakhirnya periode gencatan senjata sejak tahun 2013

Diolah dari berbagai sumber

Pada bulan Maret 2013, gencatan senjata disepakati antara pihak PKK dan Turki setelah upaya negosiasi yang dilakukan oleh Badan Intelijen Nasional Turki (*Mili Istihbarat Teskilati*, MIT) dengan Ocalan sejak bulan Oktober 2012. Gencatan

senjata ini meliputi pemindahan seluruh personil PKK dari wilayah Turki dan mengentikan aksi teror, disusul dengan pelepasan delapan sandra yang merupakan personil militer dan pelayan publik.⁴² Namun, pada tahun 2015 gencatan senjata yang telah disepakati sejak dua tahun sebelumnya akhirnya pecah akibat insiden bom bunuh di kota Suruc pada tanggal 20 Juli 2015 di kantor Pusat Budaya Amara. Korban jiwa berjumlah tiga puluh empat orang dan tujuh puluh enam luka-luka; dimana sebagian besar korban merupakan etnis Kurdi.⁴³ Peristiwa ini akhirnya memicu aksi balas dendam oleh PKK dengan membunuh tiga personil kepolisian di provinsi Adiyaman dan Sanliurfa pada tanggal 21-23 Juli 2015.⁴⁴ Pada bab selanjutnya akan dijelaskan perkembangan partai politik berbasis Kurdi di masa pemerintahan Erdogan serta relasinya dengan kelompok PKK.

2.3 *Halklarin Demokratik Partisi* dan Perjuangan Politik Etnis Kurdi di Era Erdogan

Untuk memahami perjuangan etnis Kurdi dalam bidang politik, penulis akan membahas bagaimana perkembangan pergerakan politik Kurdi melalui beberapa partai sebelum terbentuknya HDP (*Halklarin Demokrat Partisi*), yaitu HEP (*Halkrin Emek Partisi*), HADEP (*Halklarin Demokratisi Partisi*), DTP

⁴² Gonul Tol, *The PKK cease-fire and Syria's Kurds*, Foreign Policy, 22 Maret 2013, diakses melalui <http://foreignpolicy.com/2013/03/22/the-pkk-cease-fire-and-syrias-kurds/> (5/3/2018, 21:04 WIB)

⁴³ *Suruc Massacre: 'Turkish Student' was suicide bomber*, BBC News, 22 Juli 2015, diakses dalam <http://www.bbc.com/news/world-europe-33619043> (5/3/2018, 21:32 WIB)

⁴⁴ Chris Kozak, *Turkey Expands Campaign Against ISIS and the PKK*, Institute for the Study of War, 25 Juli 2015, diakses dalam <http://www.understandingwar.org/backgroundunder/turkey-expands-campaign-against-isis-and-pkk> (5/3/18, 21:35 WIB)

(*Demokrat Partisi*) dan BDP (*Baris Ve Demokrati Partisi*). Setelah itu dilanjutkan dengan seluk-beluk HDP secara lebih spesifik.

2.3.1 Perjuangan Politik Etnis Kurdi Sebelum Berdirinya *Halklarin Demokrat Partisi*

Pada akhir dekade 1980-an, para kaum intelektual Kurdi berinisiatif untuk mencari solusi untuk permasalahan legitimasi etnis dengan cara selain kekerasan. Akhirnya dilakukan tindakan kooperasi dengan sebuah partai sosial-demokrat; yaitu Partai Sosial Demokrat (*Sosyal Demokrat Halkci Parti*, SHP). Orientasi sikap kelompok Kurdi tersebut juga berdasarkan kecenderungan partai sayap kanan untuk tidak membawa-bawa permasalahan Kurdi dalam agenda partai. Ini cukup menguntungkan bagi SHP karena kandidat-kandidat Kurdi dapat menghimpun basis elektoral yang lebih potensial di daerah-daerah etnis Kurdi; provinsi-provinsi di Turki bagian tenggara. Namun, SHP akhirnya melakukan pengusiran kader Kurdi pasca keputusan tujuh deputi Kurdi untuk menghadiri sebuah konferensi di Paris untuk membahas permasalahan hak-hak Kurdi; meskipun izin tidak diberikan oleh pimpinan SHP. Tindakan pengusiran hanya berlaku bagi anggota partai yang menghadiri konferensi tersebut⁴⁵

Peristiwa ini memicu tindakan kolektif dalam tubuh partai SHP; di mana dua belas ketua provinsi partai yang pro-Kurdi mengajukan pengunduran diri dan menyatakan ketidakpuasannya atas sikap partai, disusul oleh beberapa anggota partai lainnya. Para eks-anggota partai SHP tersebut akhirnya berkumpul untuk

⁴⁵ Berk Emek, *The Kurdish Political Movement in Turkey: Transformation from an Ethnic Into A Progressive Party*, Thesis, Budapest: Departement of Political Science, Central European University, hal.21 *Et. Seq.*

merumuskan rancangan partai yang bertujuan untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat yang terdiskriminasi, namun partai tidak mampu menghimpun suara dari kelompok-kelompok minoritas lainnya dan akhirnya keanggotaan etnis Kurdi menjadi lebih dominan. Tujuan dan program dari partai ini lalu menyempit kedalam perjuangan hak-hak dan kepentingan Kurdi; dan terbentuklah partai pro-Kurdi resmi yang pertama, yaitu Partai Buruh Masyarakat (*Halkm Emek Partisi*, HEP) pada tahun 1990.⁴⁶ Dibawah pimpinan Ahmet Fehmi Isiklar, partai yang berorientasi sosial-demokrat ini memiliki empat prinsip dasar; yaitu demokratisasi, perbaikan ekonomi, hak-hak budaya, dan kebijakan luar negeri. Partai ini hadir sebagai penepis stigma bahwa tidak semua Kurdi menempuh jalan kekerasan; dan mereka menolak dikaitkan dengan gerakan insurgensi PKK.⁴⁷

Pasca terbentuknya HEP, SHP menawarkan koalisi terhadap partai HEP terkait pelaksanaan pemilu tahun 1991 untuk memperoleh elektabilitas suara di provinsi-provinsi yang berpenduduk mayoritas etnis Kurdi. Namun, para nasionalis/Kemalis tidak menyetujui rencana ini dan menuduh anggota HEP memiliki hubungan dengan PKK; bahwa HEP didirikan sebagai representasi sebuah organisasi teroris. Koalisi ini terpecah sebelum pelaksanaan pemilu dan akhirnya dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 1993.⁴⁸ Partai pro-Kurdi lainnya dibentuk, yaitu Partai Demokrasi (*Demokrasi Partisi*, DEP) yang agendanya khusus untuk memperjuangkan hak-hak etnis Kurdi; melalui usaha pencegahan konflik etnis dan mencari solusi permanen untuk rekonsiliasi. Anggota partai ini berasal

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 22

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 23

⁴⁸ HEP dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi atas dasar dugaan bahwa partai tersebut telah menjadi pusat aktifitas ilegal dalam konteks gerakan separatis, dalam *Ibid.*, hal. 24

dari eks-partai HEP, dan partai ini dibubarkan tak lama setelah berdirinya terkait pecahnya gencatan senjata antara PKK dan pemerintah pasca kematian Presiden Turgut Ozal pada tahun 1995, dengan dugaan afiliasinya dengan PKK.⁴⁹ Perjuangan politik dilanjutkan oleh Partai Demokrasi Rakyat (*Halkin Demokratisi Partisi*, HADEP) yang dipimpin oleh Murat Bozlak dan berhasil memperoleh suara dari seluruh provinsi dengan penduduk mayoritas Kurdi pada pemilu 1995. Para pendukung HADEP juga merupakan pendukung PKK; yang notabene mendukung perjuangan dengan aksi kekerasan. Pasca penahanan Ocalan, HADEP tetap loyal kepada PKK dan Ocalan hingga akhirnya dibubarkan pada tahun 2004.⁵⁰

Terkait persiapan kebijakan *Kurdish Opening* di era Erdogan; yaitu pemberian hak-hak suara dalam politik serta media terhadap etnis Kurdi yang sebelumnya tidak pernah diberikan; terkait salah satu poin keberatan penerimaan Turki kedalam Uni Eropa ialah permasalahan Kurdi dalam konteks hak asasi manusia, politisi dan aktivis Kurdi melihat kesempatan ini sebagai momen untuk mendirikan partai politik baru.⁵¹ Terbentuklah Partai Masyarakat Demokratis (*Demokratik Toplum Partisi*, DTP) pada tahun 2005 dan menjadi partai dominan di provinsi elektoral Kurdi pada tahun 2007; dipimpin oleh Ahmet Turk, Emine Ayna, Aysel Tugluk, dan Nurettin Demirtas sebelum akhirnya dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009 dengan dugaan afiliasi dengan PKK.⁵² Program partai DTP sendiri lebih cenderung kearah multikulturalisme, kesetaraan,

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 25

⁵⁰ Sikap pro-PKK ini nampak pada kongres partai pertamanya yang merupakan bentuk dukungan terhadap figur Abdullah Ocalan, pemimpin PKK, dalam *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*, hal. 9

⁵² Cengiz Gunes, *Turkey's New Left*, New Masses, New Left Review No. 107, September-Oktober 2017, hal. 17

keadilan, kebebasan dan Perdamaian. Namun, terkait basis dukungannya yang merupakan etnis Kurdi, identitas sebagai “partai Kurdi” melekat pada DTP.⁵³ Perjuangan Kurdi kembali dilanjutkan dengan Partai Perdamaian dan Demokrasi (*Baris Ve Demokrasi Partisi*, BDP), dibentuk pada tahun 2008 dan memiliki agenda yang serupa dengan DTP, dipimpin oleh Pervin Buldan dan Idris Balukan hingga dibubarkan pada tahun 2012 atas dugaan yang serupa.⁵⁴ Kemunculan DTP tepat sebelum pelaksanaan pemilu di tahun 2011 membentuk blok Buruh, Demokrasi, dan Kebebasan, dan berhasil mengirimkan tiga puluh enam kandidat representatifnya kedalam parlemen sebagai perwakilan independen.⁵⁵

Aktivitas blok ini pasca diberlakukannya kebijakan *Kurdish Opening* secara resmi pada tahun 2009 dilanjutkan dengan peng gagasan Kongres Demokrasi (*Halkların Demokrasi Kongresi*, HDK) atas perintah Ocalan dari tahanan; dengan cita-cita menjadikan gerakan politik Kurdi sebagai “partai Turki” agar nampak sebagai aktor politik yang sah tanpa membawa identitas etnis tertentu. Anggota HDK berasal dari berbagai kelompok minoritas; seperti etnis Alawiyah, Armenia, Kirkasia, Laz, Arab dan Asiria. Tak luput juga kelompok feminis, sosialis, kiri jauh (*far left*), pecinta lingkungan, komunitas orang cacat, serta LGBT.⁵⁶ Berikut ini adalah daftar partai basis/pro-Kurdi mulai dari tahun 1990 hingga 2012; dengan komposisi keanggotaannya serta bentuk afiliasinya dengan PKK;

⁵³ Emek, *Loc. Cit.*, hal. 27

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 28

⁵⁵ Duygu Atlas, *People's Democracy Party (HDP): A Breath of Fresh Air for the Turkish Opposition*, Tel Aviv Notes; Volume 7 No. 22, 26 November 2013, hal. 1

⁵⁶ LGBT disini merupakan akronim dari *Lesbian, Gay, Bisexuals, and Transgender*, dalam *Ibid.*, hal. 1 *Et. Seq.*

Tabel 2.3.1 Daftar Partai Pro-Kurdi (Dari 1990 Hingga 2012)

No.	Nama Partai	Agenda Politik	Keanggotaan	Afiliasi dengan PKK
1.	HEP	Demokratisasi, kemajuan ekonomi, dan kebijakan luar negeri	Gabungan dari politisi Turki dan Kurdi sayap kiri	Mendapat dukungan dari PKK
2.	HADEP	Perjuangan hak-hak minoritas Kurdi dan demokratisasi	Anggota dari berbagai macam pergerakan-pergerakan Kurdi dengan beberapa politisi sayap kiri	Mencoba menjaga jarak dengan PKK, namun tidak menolak eksistensi PKK
3.	DTP	Kesetaraan gender, kebebasan berekspresi, desentralisasi kekuatan politik dan demokratisasi	Anggota dari berbagai macam pergerakan-pergerakan Kurdi, beberapa politisi sayap kiri, serta kelompok etnis dan minoritas lainnya	Tidak mendukung aksi kekerasan yang dilakukan PKK, namun tidak menolak eksistensi PKK
4.	BDP	Kesetaraan gender, kebebasan berekspresi, desentralisasi kekuatan politik dan demokratisasi	Politisi dari berbagai macam partai politik sayap kiri, kader eks-DTP, serta kelompok etnis	Berdialog langsung dengan kepemimpinan PKK

			dan minoritas lainnya	
--	--	--	--------------------------	--

Sumber: Berk Emek, The Kurdish Political Movement in Turkey

Keberadaan HDK yang notabenenya bukan sebuah partai politik; atau lebih tepat dikatakan sebagai badan kongres telah berperan sebagai wadah penyatuan politik dari kelompok-kelompok minoritas yang sebelumnya tidak dapat mewakili suara-suara politiknya; dan juga merupakan cikal bakal dari berdirinya HDP.

2.3.2 Berdirinya *Halklarin Demokratik Partisi*

Seiring dengan upaya militer untuk menormalisasi perannya yang terus menurun dalam perpolitikan Turki, dan usaha pemerintah untuk berkomunikasi dengan Ocalan dalam mencapai solusi permanen atas permasalahan Kurdi tersebut; HDP (*Halklarin Demokratik Partisi*) dibentuk pada tahun 2012 dengan tujuan untuk memperjuangkan kesetaraan dan kebebasan bagi seluruh masyarakat Turki. Pendirian HDP dengan konsep partai progresif dan tidak berangkat dari motif etnis menunjukkan bahwa pergerakan Kurdi tidak lagi mendukung sikap nasionalisme radikal.⁵⁷ Dalam pembentukan partai ini, seluruh elemen dari HDK berpartisipasi didalamnya; ditambah beberapa kelompok lainnya seperti etnis Albania, Pomak, Yunani, Zaza, dan Roma.⁵⁸ Sejatinya HDP tidak hanya memperjuangkan

⁵⁷ Emek, *Loc. Cit.*, hal. 32

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 33

kepentingan satu etnis semata; dapat dilihat dari anggota dari etnis Kurdi yang tidak menempati posisi kepemimpinan utama dari pergerakan partai, didukung dengan fakta bahwa sekitar empat puluh lebih organisasi; termasuk didalamnya sayap kiri, kelompok pecinta lingkungan, serikat-serikat pekerja, dan LBGT yang tergabung didalamnya. Dalam pemilihan kandidat partai tiap daerah komposisinya berisi individu-individu yang memiliki pandangan ideologi, identitas, dan politik yang berbeda-beda.⁵⁹ Dari segi kepemimpinan, HDP menganut sistem *co-chairman* yang dipimpin oleh Sebahat Tuncel dan Ertugrul Kurkcu pada masa awal pendiriannya.⁶⁰

Hambatan-hambatan yang dimiliki HDP dalam menekan kapabilitasnya untuk mendapat dukungan suara adalah; 1) reputasinya yang didukung oleh fakta bahwa HDP merupakan gagasan dari pemimpin PKK, Abdullah Ocalan, serta; 2) karakter kiri dan sosialis yang dimiliki HDP, terkait relevansinya yang sudah memudar pasca puncak pergerakan sayap kiri pada dekade 1960-an hingga 1970-an; di mana basis elektoral Turki di era AKP cenderung memilih partai sayap tengah maupun kanan.⁶¹ Namun disamping itu semua, HDP diuntungkan dengan kondisi sosio-politik yang ada di dua tahun masa awal pendiriannya sebelum partisipasinya dalam pemilu tahun 2015; yaitu insiden *Gezi Park* pada tahun 2013 yang memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim AKP dan bersamaan dengan itu kebutuhan akan partai oposisi yang kompetitif muncul. Sebagai contoh; Surreya Onder, figur dalam aksi protes *Gezi Park* menjadi anggota dari HDP dan menjadi kandidat pemimpin untuk daerah Istanbul. HDP dapat menumbuhkan imej sebagai

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 33 *Et. Seq.*

⁶⁰ Ertugrul Kurkcu merupakan mantan presiden gerakan sosialis Federasi Muda Revolusioner Turki (DEV-GENC) pada dekade 1970-an, dalam Atlas, *Loc. Cit.* hal. 2

⁶¹ *Ibid.*,

partai oposisi dan wadah penghimpun segala kelompok minor yang tidak puas dengan rezim pemerintahan yang ada.⁶²

Untuk pertama kalinya HDP hadir dalam panggung perpolitikan pada pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota Majelis Agung Nasional Turki (*Türkiye Büyük Millet Meclisi*; TBMM) di bulan Juni 2015, dan meraup lebih dari enam juta suara (melalui pemungutan suara lokal maupun internasional).⁶³ Dengan perolehan presentase sebesar 13%; atau 80 kursi di parlemen (6.058.489 suara), HDP yang saat itu dipimpin oleh Selahattin Demirtas dan Figen Yuksekdağ menjadi partai basis Kurdi pertama kalinya yang mampu menembus batas *threshold* sebesar 10% dan berhasil masuk kedalam parlemen.⁶⁴ Namun, pada pemilu ulang November tahun 2015, suara yang masuk untuk HDP turun drastis, menjadi hanya 40 kursi di parlemen (5.148.065 suara).⁶⁵ Dalam periode tersebut, gencatan senjata antara pihak Turki dengan PKK yang telah disepakati di tahun 2013 akhirnya pecah kembali.⁶⁶ Dilanjutkan dengan penahanan Demirtas dan Yuksekdağ oleh pemerintah Turki atas ketidakhadirannya dalam pelaksanaan sidang yang dihelat untuk membahas keterkaitan maupun afiliasi HDP dengan PKK, serta tuduhan yang dilayangkan pemerintah terhadap HDP bahwa partainya selama ini telah berkontribusi dalam menyebarkan ideologi PKK.

⁶² *Ibid.*, hal. 3

⁶³ *Information File on Violence in Turkey*, Peoples Democratic Party: Foreign Affairs Commission, HDP (Halkların Demokrat Partisi), 11 September 2015, hal. 2

⁶⁴ John Henley, Kareem Shaheen, Constanze Letsch, *Turkey Election: Erdogan and AKP return to power with outright majority*, *Loc. Cit.*,

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ *Suruc Massacre: 'Turkish Student' was suicide bomber*, *Loc. Cit.*

2.4 Penurunan Popularitas Serta Elektabilitas *Adaliyet ve Kalkinma Partisi* dan Erdogan

Partai Keadilan dan Pembangunan, atau AKP (*Adaliyet ve Kalkinma Partisi*) merupakan partai yang menguasai pemerintahan Turki melalui badan parlemen sejak tahun 2002. Pecahnya Partai Kebajikan (*Fazilet Parti*; FP) dan adanya perbedaan haluan antara para petinggi partai yang terbagi menjadi dua golongan yaitu tradisional (*gelenekciler*) dan reformis (*yenilkciler*) merupakan cikal-bakal terbentuknya AKP. Golongan reformis akhirnya mendirikan AKP, sedangkan golongan tradisional mendirikan Partai Kejujuran (*Saadet Partisi*, SP), di mana menurut Yesilada hanya menjadi “pemain kecil” dalam panggung perpolitikan.⁶⁷ AKP berhasil memenuhi berbagai aspek partai politik; seperti pemimpin yang kapabel, pengorganisasian partai yang dinamis, mengadaptasi garis ideologis dan haluan partai terhadap perubahan opini publik, memiliki taktis yang jelas dan strategis, dan pengkaderan aktivis partai yang berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan ekspansi partai. Imej AKP juga disokong oleh sosok Erdogan yang karismatik dan berani. AKP menjanjikan reformasi politik dan ekonomi, keanggotaan Uni Eropa, serta penyelesaian masalah Siprus.⁶⁸

Dalam tubuh AKP, terdapat dua haluan ideologis; yaitu kelompok Turki-Islam dan Islam-Turki. Kelompok Turki-Islam mengedepankan persaudaraan politik/nasionalisme diatas persaudaraan Islam, sedangkan bagi Islam-Turki, Islam

⁶⁷ Mengutip Yesilada; “*The reformists formed the AKP and succeeded in getting the support... while the traditionalist formed the Felicity (Saadet) Party, which became a minor player on the political scene.*” Dalam Birol A. Yesilada, *The Future of Erdogan and the AKP*, Turkish Studies, 26 Februari 2016, No. 17:1, 19-30, hal. 20

⁶⁸ *Ibid., Et. Seq.*,

lebih didahulukan ketimbang nasionalisme dan politik. Bagi kelompok Islam-Turki, identitas nasional disadur dari nilai-nilai Islam dan tradisi Usmaniyah, menekankan pelayanan kepada masyarakat sebagai nilai akhir dan skeptis terhadap ideologi Kemalisme yang membatasi hak-hak beragama.⁶⁹ Sebagai tambahan; kelompok Turki-Islam menentang konsensi apapun terhadap etnis Kurdi, namun kelompok Islam-Turki mengakui hak-hak budaya Kurdi atas nama persatuan nasional. Dalam pergerakannya, AKP lebih condong ke sikap-sikap Islam-Turki.⁷⁰ Meskipun dalam dokumen-dokumen formal yang ada, AKP menyatakan menolak dikategorikan sebagai partai Islamis dan memposisikan dirinya sebafei partai demokrat-konservatif (*muhafazakarlardemokrat*) yang memperjuangkan nilai-nilai religius tradisional.⁷¹

Sejak terpilihnya AKP sebagai *majority party* di tahun 2002, kursi yang diperoleh AKP dalam pemilu selalu diatas ketentuan *majority party* dengan syarat minimal 276 kursi dari total 550 kursi di TBMM. Dapat dilihat pada pemilu 2002 AKP berhasil memenangkan 363 kursi di parlemen; dan pada waktu itu posisi Perdana Menteri dijabat oleh Erdogan lalu posisi Presiden dijabat oleh Ahmet Necdet Sezer.⁷² Pada pemilihan selanjutnya di tahun 2007 yang juga dibarengi dengan pemilihan presiden yang dimenangkan oleh Abdullah Gul dari partai AKP; seorang Menteri Luar Negeri di era Sezer. Gul memperoleh 339 suara dari anggota

⁶⁹ M. Hakan Yavuz, 2009, *Secularism and Muslim Democracy in Turkey*, Cambridge: Cambridge University Press, hal. 104 *Et. Seq.* Dalam M. Alfian Alfian, 2017, *Militer dan Politik di Turki: Dinamika Politik Pasca-AKP Hingga Gagalnya Kudeta*, Bekasi: Penjuru Ilmu, hal. 67

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ Ali Carkoglu dan Ersin Kalaycioglu, 2009, *The Rising Tide of Conservatism in Turkey*, New York, Palgrave Macmillan, hal. 15 dalam Alfian, *Ibid.*,

⁷² Owen Bowcott, *Islamic party wins in Turkey*, The Guardian, 7 November 2002, diakses melalui <https://www.theguardian.com/world/2002/nov/07/turkey.owenbowcott> (4/3/2018, 08:16 WIB)

TBMM. Untuk hasil pemilu dalam memilih anggota TBMM, AKP berhasil mengamankan 341 kursi, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hasil pemilu perdananya dengan selisih 22 kursi. Pada periode ini Erdogan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri.⁷³ Dalam pelaksanaan pemilu 2011, AKP kembali memenangkan suara mayoritas dengan perolehan suara sebesar 325 kursi di parlemen.⁷⁴ Selisih 16 kursi lebih rendah dibandingkan dengan hasil pemilu sebelumnya di tahun 2007. Pemilu presiden kembali dilaksanakan di tahun 2014 dengan pelaksanaan pemilu secara langsung, tidak melalui TBMM seperti dua pemilu sebelumnya. Erdogan berhasil terpilih dengan presentase perolehan 51,79%; atau 21,000,143 suara dari total suara secara keseluruhan. Ahmet Davutoglu dari partai AKP akhirnya dipilih untuk menggantikan posisi Erdogan sebagai Perdana Menteri.⁷⁵

Setelah itu pada pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2015; peruntungan AKP tidak semujur sebelumnya; di mana pemilu di tahun tersebut dilaksanakan sebanyak dua kali pada bulan Juni dan November karena di putaran awal tidak ada partai yang mampu mencapai syarat menjadi *majority party*; AKP hanya memperoleh 258 kursi, MHP dengan 80 kursi, HDP dengan 80 kursi dan CHP memperoleh 132 kursi. Pada bulan Juni untuk pertama kalinya AKP gagal mengamankan posisinya sebagai *majority party*, dan untuk pertama kalinya juga

⁷³ Mark Tran, *Gul elected as Turkish President*, The Guardian, 28 Agustus 2007, diakses melalui <https://www.theguardian.com/world/2007/aug/28/turkey.marktran1> (4/3/2018, 08:22 WIB)

⁷⁴ Constanze Lestch, *Recep Erdogan wins by landslide in Turkey's general election*, The Guardian, 13 Juni 2011, diakses melalui <https://www.theguardian.com/world/2011/jun/13/recep-erdogan-turkey-general-election> (4/3/2018, 08:32 WIB)

⁷⁵ Ergun Ozbudun, *The 2014 Presidential Elections in Turkey: a post-election analysis*, openDemocracy, 20 Oktober 2014, diakses melalui <https://www.opendemocracy.net/ergun-%C3%B6zbudun/2014-presidential-elections-in-turkey-postelection-analysis> (4/3/2018, 08:44 WIB)

partai basis Kurdi, yaitu HDP berhasil melewati batas *threshold* pemilu dalam sejarah Turki.⁷⁶ Upaya koalisi partai dilakukan namun tidak menemui jalan keluar, di mana AKP gagal berkoalisi dengan CHP maupun MHP hingga pemilu ulang (*snap election*) diadakan di bulan November di tahun yang sama.⁷⁷ Pada pemilu di bulan November AKP berhasil memperoleh 49,5% suara atau 317 kursi di parlemen.⁷⁸ Suara yang diperoleh partai CHP turun menjadi 25,4%, atau 134 kursi, MHP menjadi 12%, atau 40 kursi dan HDP memperoleh 59 kursi dan AKP kembali menjadi *majority party* pada pemilu 2015.⁷⁹ Berikut ini adalah tabel hasil perolehan pemilu AKP sejak 2002 hingga tahun 2015;

Tabel 2.4.1 Hasil Perolehan Pemilu AKP Sejak 2002 Hingga 2015

No.	Tanggal Pelaksanaan	Perolehan Suara AKP (dengan total 550 kursi di parlemen/TBMM)
1.	2002	34,3% suara, atau 363 kursi
2.	2007	46,6% suara, atau 341 kursi
3.	2011	49,9% suara, atau 326 kursi
4.	Juni 2015	40,9% suara, atau 258 kursi
5.	November 2015	49,5% suara, atau 317 kursi

⁷⁶ Adapun *threshold* yang ditetapkan sebesar 10% dari total keseluruhan suara; jika suara yang diperoleh suatu partai melewati *threshold* tersebut, partai tersebut berhak mendapatkan kursi di TBMM, dalam Alberto Nardelli, *Turkey Election Results: what you need to know*, The Guardian, 8 Juni 2015, diakses melalui <https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/jun/08/turkey-election-results-what-you-need-to-know> (4/3/2018, 08:58 WIB),.

⁷⁷ *Turkey snap election called after coalition talks fail*, BBC News, diakses melalui <http://www.bbc.com/news/world-europe-34018497> (5/3/2018 06:05 WIB)

⁷⁸ Birol A. Yesilada, *Loc. Cit.*, hal. 21

⁷⁹ John Henley, Kareem Shaheen, Constanze Letsch, *Turkey Election: Erdogan and AKP return to power with outright majority*, diakses melalui <https://www.theguardian.com/world/2015/nov/01/turkish-election-akp-set-for-majority-with-90-of-vote-counted> (5/3/2018 06:06 WIB)

Sumber: Birol A. Yesilada, The Future of Erdogan and the AKP

Menurunnya elektabilitas AKP pada pemilu Juni tahun 2015 dapat dilihat dari beberapa faktor; seperti kecondongan AKP terhadap politik Islam, terkuaknya permasalahan korupsi dalam tubuh pemerintah, serta permasalahan HAM dan kebebasan pers.

Dimulai dari kecondongan AKP kepada politik Islam yang memicu pertentangan dan kritik dari golongan sekularis/nasionalis dan militer. Sebagai contoh dapat dilihat dari pidato Kepala Staf Gabungan TSK Jenderal Hilmi Ozbek pada 23 Desember 2004 yang menyinggung adanya gerakan reaksioner dan kelompok Islamis yang merupakan ancaman bagi Turki, dilanjutkan dengan pidato Wakil Kepala Staf Gabungan Ilker Basbug pada 26 Januari 2005 yang menyatakan kesediannya untuk melawan gerakan-gerakan separatis tersebut.⁸⁰ Jenderal Ozbek pada 20 April 2005 mengungkapkan ada ancaman selain teror yang dapat mengubah dasar negara; yaitu pemaknaan baru terhadap konsep sekulerisme, nasionalisme, hubungan agama-negara, agama-masyarakat, agama-individu, dan individu negara.⁸¹ Polemik larangan berjilbab juga menciptakan ketegangan antara AKP dan militer; di mana penggunaan jilbab yang dinilai sebagai simbol politik Islam yang dianggap tidak sesuai dengan konsepsi sekularisme Turki oleh militer, dianggap sebagai suatu bentuk pembatasan kebebasan individu oleh Erdogan, yang

⁸⁰ Mengutip Ozbek; "Angkatan bersenjata tidak akan merubah pendekatannya terhadap ancaman yang berangkat dari kecenderungan keagamaan itu", dalam *Military warns Islamic groups threaten Turkey*, Daily Times, 3 Desember 2005, diakses melalui <http://dailytimes.com.pk>; *Press briefing Basbug*, 26 Januari 2005, diakses melalui www.tsk.mil.tr, dalam M. Alfian Alfian, hal. 97

⁸¹ *Annual Evaluation Speech*, 20 April 2005, diakses melalui www.tsk.mil.tr, dalam M. Alfian Alfian, *Ibid.*,

saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri yang berbasis di AKP.⁸² Usaha pencabutan larangan ini dimulai sejak 2003, dan berhasil di amandemen pada Februari 2008 melalui persetujuan parlemen (441 dari 550 kursi) yang ditandatangani oleh Presiden Gul⁸³. Gugatan dilakukan oleh partai CHP dan Partai DSP di Mahkamah Konstitusi (*Anayasa Mahkemesi*) agar pencabutan ini dapat dibatalkan. Hal ini berdampak pada permintaan Abdurrahman Yalcinkaya, Kepala Kejaksaan Mahkamah Agung Banding (*Turkiye Cumhuriyet Yargitay Baskanligi*) terhadap Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan AKP dan memberikan larangan berpolitik untuk tujuh puluh satu anggota partainya, termasuk Erdogan dan Gul, serta empat puluh anggota parlemen dan 11 walikota dengan tuntunan telah melakukan aktivitas yang bersifat anti-sekular. AKP yang menduduki 340 dari 550 kursi di parlemen dianggap bertanggung jawab atas amandemen tersebut.⁸⁴

Hingga pada 5 Juni 2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatalan larangan penggunaan jilbab bersifat inkonstitusional,⁸⁵ dilanjutkan dengan pencabutan bantuan keuangan dari negara sebesar lima puluh persen terhadap partai AKP pada 30 Juli 2008. Tujuh dari sembilan hakim konstitusi menyatakan tidak setuju dengan pembubaran AKP.⁸⁶ Realisasi pencabutan

⁸² Usulan revisi undang-undang mulai dilakukan pada tahun 2003, disusul dengan tanggapan Jenderal Ozkok pada Januari 2003; “Kami menghormati keyakinan agama dan cara berekspresi dalam kehidupan pribadi individu ... namun, kita seharusnya tidak diharapkan untuk mentolerir ... hal jilbab, sebagai simbol dan tindakan yang bertujuan mengikis tradisi republik”, dalam *Turkish army issues Islam warning*, BBC, 9 Januari 2003, diakses melalui <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/-2641767.stm>, dalam M. Alfian Alfian, *Ibid.*,

⁸³ *Ibid.*,

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 100

⁸⁵ Melalui pemungutan suara dengan hasil sembilan banding dua di Mahkamah Konstitusi; dalam M. Alfian Alfian, *Ibid.*,

⁸⁶ Carol Midgalovitz, 2008, *Turkey: Update on Crisis of Identity and Power*, CRS Report for Congress, 2 September, hal. 4 dalam M. Alfian Alfian., hal. 101

larangan berjilbab dapat benar-benar terlaksana pada September 2013, yang ditargetkan pada para pegawai negeri, kecuali mereka yang bekerja di kehakiman, kejaksaan, kepolisian, dan militer, disusul dengan empat anggota parlemen perempuan yang mengenakan jilbab untuk pertama kalinya dalam sejarah Turki.⁸⁷

Selanjutnya kasus permasalahan korupsi di pemerintahan Turki yang terkuak pada tahun 2013, yang melibatkan anggota keluarga dari para elit politik. Terdapat skema perdagangan “*gas for gold*” yang dilakukan dengan pihak Iran untuk dapat mengimpor gas dan minyak, dan membayarnya dengan emas dalam keadaan Iran sedang dikenakan sanksi perdagangan oleh Amerika Serikat. Transaksi tersebut dilakukan melalui bank pemerintah *Halkbank* yang akhirnya membuat pihak Amerika Serikat mengajukan tuntutan terhadap *Halkbank*.⁸⁸ Sejumlah tersangka yang berjumlah lima puluh dua orang tersebut memiliki kaitan dengan AKP, seperti Suleyman Aslan, direktur *Halkbank* yang merupakan putra dari mantan menteri dalam negeri, hingga Bilal Erdogan, yang merupakan putra dari Erdogan sendiri. Insiden ini memicu pengunduran diri empat menteri; Menteri Ekonomi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hubungan Uni Eropa, dan Menteri Perencanaan Publik atas permintaan Perdana Menteri Davutoglu di tahun 2014, pemecatan ribuan personil kepolisian, hakim, dan jaksa penuntut umum.⁸⁹

⁸⁷ *Turkey lifts generations-old ban on Islamic head scarf*, Reuters, 8 Oktober 2013, diakses melalui <http://www.reuters.com/article/2013/10/08/us-turkey-headscarf-ban-idUSBR-E99708720131008> dalam M. Alfian Alfian., hal. 102

⁸⁸ Michael B. Kelley, *A 2-Minute Guide To The Crisis In Turkey That Sent Markets Tanking Andn Put The Government In Its Weakest Position Yet*, Bussines Insider, 27 Desember 2013, diakses melalui <http://www.businessinsider.com/recap-of-corruption-scandal-in-turkey-2013-12/?IR=T> (05/05/2018, 18:20 WIB)

⁸⁹ Berivan Orucoglu, *Why Turkey's Mother of All Corruption Scandals Refuses to Go Away*, Foreign Policy, 6 Januari 2015, diakses melalui <https://foreignpolicy.com/2015/01/06/why-turkeys-mother-of-all-corruption-scandals-refuses-to-go-away/> (05/05/2018, 18:34 WIB)

Dilanjutkan dengan permasalahan hak asasi dan kebebasan pers yang dipicu oleh insiden *Gezi Park* di tahun 2013; yang merupakan tindakan kekerasan terhadap demonstran di Istanbul serta penahanan para jurnalis yang mengkritik ataupun melakukan penghinaan terhadap Erdogan dan kebijakan-kebijakannya. Insiden ini bermula pada aksi kampanye para *enviromentalist* tentang rencana penggusuran taman *Gezi*, sebagai ruang hijau di Istanbul untuk dijadikan monumen replika barak Usmani di abad ke 19, Topcu Kislasi dan pembangunan pusat perbelanjaan serta masjid oleh Erdogan sebagai bagian dari rencana pengembangan distrik Taksim. Polisi yang ditugaskan untuk menangani aksi demonstrasi itu menggunakan cara-cara kekerasan, dan berujung pada aksi penangkapan para jurnalis yang dituduh telah melakukan tindakan mengkritik pemerintahan AKP.⁹⁰

Ketiga permasalahan diatas yang menjadi pertimbangan penulis menjadi faktor-faktor penurunan elektabilitas Erdogan dan AKP hingga pada tahun 2015. Indikasinya dapat dilihat dari hilangnya basis elektoral dari kelompok sekular dan nasionalis akibat kecenderungan pemerintahan Islam dan menyimpang dari ideologi Kemalisme.⁹¹ Selain itu hilangnya basis elektoral dari kelompok jurnalis, dan *enviromentalis* terkait insiden *Gezi Park*; yang akhirnya beberapa tokoh dari pergerakan tersebut bergabung dalam kelompok oposisi AKP, salah satunya adalah HDP. Namun, yang juga menjadi faktor penting adalah menurunnya kepercayaan

⁹⁰*Gezi Park: Brutal Denial of The Right To Peaceful Assembly in Turkey*, Amnesty International, Oktober 2013, EUR 44/022/2013, hal. 5 *Et. Seq.*

⁹¹ Prinsip-prinsip Kemalisme yang dimuat dalam konstitusi pada tahun 1937 dilambangkan dengan enam anak panah; yang bermakna republikanisme (*cumhuriyetcilik*), populisme (*halkcilik*), sekularisme (*laiklik*), revolusionisme (*devrimcilik*), serta nasionalisme (*milliyetcilik*, *ulusculuk*), dalam Erik J. Zürcher, 2004, *Turkey: A Modern*, London and New York: I. B. Tauris, hal. 182, dalam M. Alfian Alfian, *Op.Cit.*, hal. 42

masyarakat terhadap pemerintahan yang ada; yaitu pemerintahan AKP akibat permasalahan korupsi tersebut; muncul ketidakpuasaan masyarakat atas rezim yang berlaku. Ini yang menurut penulis menjadi faktor penyebab turunnya elektabilitas dan reputasi AKP serta Erdogan secara drastis pada pemilu Juni 2015; hingga suara yang masuk untuk partai tersebut tidak memenuhi syarat sebagai *majority party*.

2.5 Eksistensi Kurdi dalam Perspektif Erdogan

Dalam melihat konteks ini, penulis menginterpretasikan kebijakan-kebijakan rezim AKP sejak 2002 hingga 2015 sebagai cara pandang Erdogan terhadap etnis Kurdi; terkait posisi Erdogan sebagai Perdana Menteri yang berasal dari basis AKP sejak tahun 2003 dan sebagai Presiden sejak tahun 2014. Dalam proses *decision-making*, apa yang menjadi kepentingan Erdogan juga menjadi kepentingan partainya; karena elektabilitas Erdogan dan kekuatan politiknya juga berbanding lurus dengan kekuatan partainya dalam pemerintahan Turki. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan seperti pembubaran partai-partai Kurdi, *Kurdish Opening*, keberhasilan HDP dalam pemilu Juni tahun 2015 serta orientasi kebijakannya terhadap PKK hingga tahun 2015.

Seperti yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, terdapat beberapa partai basis Kurdi yang didirikan oleh golongan Kurdi nasionalis dan berjuang dalam kontestasi politik mulai dari HEP, HADEP, DTP, BDP, hingga HDP. Partai yang terbentuk dan beroperasi di era Erdogan adalah DTP, yang dibentuk pada tahun 2005, lalu BDP yang dibentuk pada tahun 2008, dan HDP yang dibentuk pada tahun 2011. DTP dan BDP yang mengalami nasib yang sama, yaitu dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan dasar dakwaan terlibat/berafiliasi dengan kelompok

insurgensi PKK. Meskipun sikap Erdogan mulai melunak melalui *Kurdish Opening*, reaksinya terhadap pergerakan politik Kurdi dapat dinyatakan kurang positif. *Kurdish Opening* secara garis besar berangkat pada ranah budaya dan hak asasi manusia bukan pada bidang politik, dan kebijakan ini juga diterapkan dengan motif dasar berupa upaya asesi Turki kedalam Uni Eropa.

Sikap Erdogan terhadap pergerakan Kurdi melalui jalur non-politis/kekerasan cenderung represif; dalam artian Erdogan melalui rezim AKP terus berusaha mengambil tindakan untuk melumpuhkan gerakan PKK di wilayah Turki. Terdapat tiga kali periode gencatan senjata selama Erdogan berkuasa, yaitu pada tahun 2006, 2010, dan 2013 yang semuanya dilakukan atas permintaan dari pihak PKK. Nampak konsistensi Erdogan dalam memandang kelompok PKK sebagai bentuk ancaman keamanan hingga tahun 2015 pada saat pemilu dilakukan dan pecahnya gencatan senjata yang disepakati pada tahun 2013. Namun tidak dengan HDP; yang hadir sebagai partai politik Kurdi setelah BDP. Erdogan melihat HDP sebagai ancaman politis, bukan sebagai ancaman keamanan. PKK adalah simbol ancaman keamanan; namun tidak dengan partai politik, maupun isu-isu hak asasi manusia dan kebudayaan Kurdi yang sebaliknya dijunjung oleh Erdogan dalam kebijakan *Kurdish Opening*.

Pergeseran persepsi Erdogan terhadap HDP dipicu oleh jatuhnya suara AKP pada pemilu di bulan Juni tahun 2015; perolehan hanya sebesar 40,9% suara atau 258 kursi yang tidak dapat mencapai ketentuan minimal sebesar 276 kursi membuat AKP dihadapkan pada dua pilihan; koalisi dengan partai lain agar suara keduanya dapat melewati batas minimum *majority party* dan menjadi pemerintahan koalisi;

atau mengadakan pemilu ulang.⁹² Erdogan melihat menurunnya elektabilitas AKP sebagai ancaman atas tujuan dan kepentingannya; yaitu menuju Turki yang lebih Islamis. Dalam mencapai tujuan ini Erdogan membutuhkan AKP minimal sebagai *majority party* untuk dapat mengajukan referendum konstitusi. Hingga pada akhirnya setelah batas waktu empat puluh lima hari waktu yang diberikan untuk membentuk koalisi selesai, Erdogan sebagai presiden berhak mengadakan pemilihan ulang yang akhirnya jatuh pada bulan November di tahun yang sama.⁹³ Dalam pemilu yang sama, partai basis Kurdi, yaitu HDP untuk pertama kalinya melewati batas minimum sebesar 10% dari total suara dan berhasil memperoleh kursi di parlemen; yaitu 80 kursi. Erdogan melihat ini sebagai ancaman terhadap kepentingannya dan dengan bagaimanapun caranya Erdogan akan menetralkan ancaman tersebut, yaitu; menjadikan HDP sebagai entitas ancaman, sama seperti PKK, yang juga mewakili etnis Kurdi secara keseluruhan. Ini yang menjadi motif Erdogan dalam melakukan sekuritisasi HDP di tahun 2015; dan dapat disimpulkan dari pelbagai pokok penjelasan diatas bahwa Erdogan selalu melihat etnis Kurdi sebagai alat untuk mencapai kepentingan. Pandangan Erdogan terhadap eksistensi etnis Kurdi bersifat relatif dan fluktuatif; dalam artian terdapat perbedaan sikap atas aspek yang berbeda dan sikap tersebut cenderung berubah-ubah dari waktu ke waktu.. Erdogan tidak melihat etnis Kurdi semata-mata hanya melalui kaca mata negatif; ataupun hanya kaca mata positif; bagi Erdogan etnis Kurdi adalah suatu alat politik untuk mencapai kepentingan-kepentingan pribadinya, sebagai seorang

⁹² Nardelli, *Loc. Cit.*

⁹³ *Turkey Snap Election Called After Coalition Talks Fail*, BBC News, diakses dalam <http://www.bbc.com/news/world-europe-34018497> (03/05/2018 18:29 WIB)

presiden untuk mewujudkan nilai-nilai Islamis-nya ke dalam ranah politik dan negara.

Pada bab selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses sekuritisasi HDP yang dilakukan oleh Erdogan mulai bulan Juni hingga November di tahun 2015; bagaimana sekuritisasi tersebut dilaksanakan dan apa pengaruhnya terhadap persepsi HDP di mata publik secara umum.

